



# BPK Harus Audit Dana Hibah

**JAKARTA (Pos Kota)** - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) DKI Jakarta didesak untuk mengaudit penggunaan dana hibah Pemprov DKI Jakarta tahun 2014 senilai lebih dari Rp2 triliun..

Azaz Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Jakarta, menerangkan audit tersebut harus dilakukan, agar mengetahui, apakah pengelolaan dana hibah itu tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Apalagi, BPKP pernah berjanji akan memantau penyaluran dana hibah dalam APBD DKI Jakarta 2014 yang mencapai Rp5 triliun,” ujarnya, Selasa (24/2).

Menurut Tigor, audit itu harus dilakukan karena sesuai instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 32/2011, di mana penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaannya. “Jadi penerima dana hibah menjadi objek pemeriksaan dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan dan pertanggungjawabannya,” ucapnya.

### AUDIT LAPORAN

Sebelumnya, Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun, mengatakan BPK bersama pihaknya sedang mengaudit laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan kegiatan pemprov di 2014 guna menguji ketepatan dalam penggunaan anggaran segenap aparatur serta mengetahui sejauh mana anggaran digunakan, sehingga transparan dan tetap pada koridor pelayanan publik.

Audit yang dilakukan 106 anggota BPKP I dan inspektorat tersebut dijadwalkan berlangsung selama 75 hari dengan mencakup seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). (john/st)

Berikut dana hibah yang disalurkan Pemprov DKI Jakarta:

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta Rp300,12 miliar (2014) dan Rp239,51 miliar (2015).
2. Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta Rp3,5 miliar (2014) dan Rp4,5 miliar (2015).
3. Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta Rp21,44 miliar (2014) dan Rp10 miliar (2015).
4. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) DKI Jakarta Rp19,21 miliar (2014) dan Rp17,48 miliar (2015).
5. Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta Rp10,1 miliar (2014) dan Rp11 miliar (2015).
6. Pemkab Bogor Rp12,3 miliar (2014) dan Rp67,4 miliar (2015).
7. Pemkot Tangerang Rp2 miliar (2014) dan Rp100 miliar (2015).
8. Pemkot Bekasi Rp3 miliar (2014) dan Rp98,14 miliar (2015).
9. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta Rp3,5 miliar (2014) dan Rp4 miliar (2015).

10. Badan Cendana Bakti Jaya Rp3,6 miliar (2014) dan Rp4,56 miliar (2015).
11. Yayasan Putera Bahagia Jaya Rp3 miliar (2014) dan Rp4 miliar (2015).
12. Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta Rp6,81 miliar (2014) dan Rp6,81 miliar (2015).
13. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta Rp6 miliar (2014) dan Rp27 miliar (2015).
14. Yayasan Beasiswa Jakarta Rp20 miliar (2014) dan Rp20 miliar (2015).